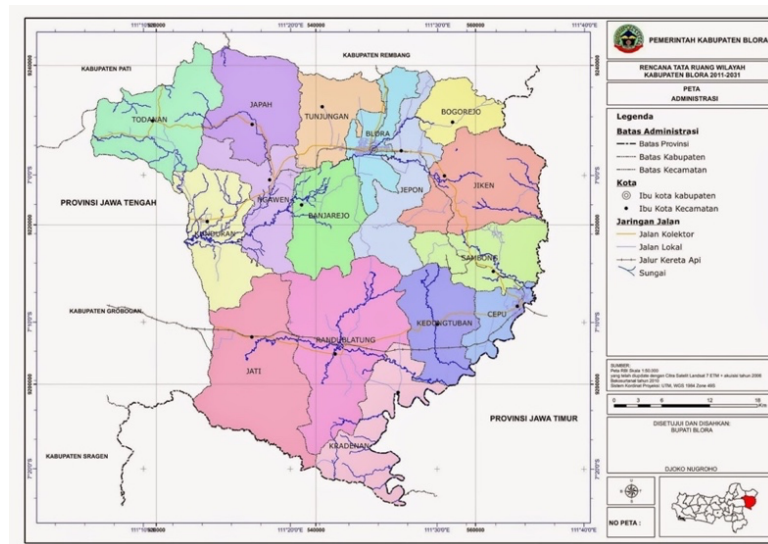


BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Blora

Kabupaten Blora dengan julukan “Blora Mustika” terletak di bagian paling timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, daerah ini memiliki luas 195.582,074 km² atau setara 195.582,074 hektar, yang mencakup sekitar 5,59% dari total luas Jawa Tengah. Letaknya yang strategis menjadikan Blora memiliki peluang besar dalam pengembangan wilayah, baik dari sisi geografis maupun aspek sosial-ekonomi.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Blora

Sumber : <http://blorakab.go.id>

Kabupaten Blora memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Barat : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan,
2. Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang,
3. Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur,

4. Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten.

Tuban yang juga berada di Provinsi Jawa Timur.

Batas-batas ini menunjukkan posisi strategis Kabupaten Blora sebagai daerah penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Blora berada di antara $111^{\circ}016'$ – $111^{\circ}338'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}528'$ – $7^{\circ}248'$ Lintang Selatan. Dari sisi geografis, wilayah ini tidak memiliki pantai dan tetap menjadi bagian dari kawasan utara Pulau Jawa. Lanskap Blora didominasi perbukitan kapur yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Kendeng Utara serta Kendeng Selatan, yang memanjang sejajar dari barat ke timur. Selain itu, wilayah ini juga dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Lusi (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, blorakab.go.id).

2.1.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Blora tercatat sebanyak 901.621 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 13.397 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa indikator demografi yang digunakan antara lain kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, serta laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun tersebut, kepadatan penduduk mencapai 506,14 jiwa per kilometer persegi, rasio jenis kelamin berada pada angka 100,38, dan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,10 persen (BPS Blora, 2024). Berikutnya adalah besaran dari jumlah penduduk tahun 2022 dan 2023 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blora:

Tabel 2. 1 Kondisi Demografis Kabupaten Blora Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)	
	2022	2023
Jati	49.507	50.398
Randublatung	77.687	78.813
Kradenan	41.163	41.800
Kedungtuban	57.578	58.465
Cepu	76.530	77.702
Sambong	27.970	28.527
Jiken	38.415	38.701
Bogorejo	24.834	25.202
Jepon	63.040	64.049
Blora	94.175	94.762
Banjarejo	62.661	63.813
Tunjungan	48.185	48.975
Japah	35.392	35.937
Ngawen	60.948	62.015
Kunduran	66.443	67.519
Todanan	63.696	64.943
Total Kabupaten Blora	888.224	90.1621

Sumber : BPS Kabupaten Blora (2024)

Berdasarkan data demografi jumlah penduduk di 16 kecamatan Kabupaten Blora pada periode 2022–2023, seluruh kecamatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan ini membawa dua sisi dampak. Dari segi positif, pertumbuhan penduduk dapat memperbesar ketersediaan tenaga kerja, memperluas pasar ekonomi lokal, serta mendorong kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta lapangan kerja, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial seperti kepadatan penduduk maupun keterbatasan fasilitas umum.

Selanjutnya, tabel berikut menyajikan data mengenai status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Blora berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023. Informasi tersebut dibedakan menurut jenis kelamin, yakni laki-laki dan

perempuan. Kategori status pekerjaan yang dicatat meliputi: bekerja secara mandiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau anggota keluarga, berusaha dengan dukungan buruh tetap bergaji, bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, pekerja lepas di sektor pertanian maupun non-pertanian, serta pekerja keluarga yang tidak memperoleh upah.

Tabel 2. 2 Jumlah Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Umum

Status Pekerjaan Utama	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
Berusaha Sendiri	50.149	40.523	90.672
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	93.759	46.418	140.177
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	9.849	3.145	12.994
Buruh/karyawan/pegawai	85.003	47.969	132.972
Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
Pekerja bebas di non pertanian	-	-	-
Pekerja keluarga/ tidak dibayar	27.634	92.246	119.880

Sumber : BPS Kab.Blora

Berdasarkan data mengenai status pekerjaan utama penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora tahun 2023, dapat diamati pola distribusi jenis pekerjaan menurut jenis kelamin. Dari tabel yang tersedia, terdapat beberapa poin penting yang bisa dianalisis:

1. Dominasi Laki-laki dalam Usaha Mandiri dan Usaha dengan Bantuan Pekerja Tidak Tetap

Jumlah laki-laki yang menjalankan usaha sendiri tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 50.149 jiwa berbanding 40.523 jiwa. Pola serupa juga terlihat pada kategori usaha yang dibantu oleh buruh tidak tetap

atau pekerja keluarga, dengan jumlah laki-laki mencapai 93.759 jiwa, sementara perempuan hanya 46.418 jiwa. Fakta ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih sering terlibat dalam kegiatan wirausaha maupun usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja tidak tetap. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh konstruksi peran gender di masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih banyak berperan di ranah domestik maupun pekerjaan informal.

2. Kesenjangan dalam Usaha dengan Buruh Tetap yang Dibayar

Pada kategori usaha yang telah mampu mempekerjakan buruh tetap dengan sistem pengupahan, jumlah laki-laki (9.849 jiwa) jauh melampaui perempuan (3.145 jiwa). Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada jenis usaha dengan skala yang lebih besar dan berstruktur, sedangkan perempuan masih lebih banyak terlibat dalam usaha kecil maupun kegiatan ekonomi informal yang belum memiliki sistem ketenagakerjaan formal.

3. Distribusi pada Kategori Buruh, Karyawan, atau Pegawai

Dalam kelompok pekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, tercatat jumlah laki-laki sebanyak 85.003 jiwa dan perempuan sebanyak 47.969 jiwa. Meskipun terdapat selisih yang cukup besar, data ini menggarisbawahi bahwa perempuan juga berperan cukup signifikan dalam sektor formal, meskipun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

2.2 Gambaran Umum DINPORABUDPAR di Kabupaten Blora



Gambar 2. 2 Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Blora memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan daerah. Dinas ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pembangunan daerah, melakukan evaluasi program, serta menyelenggarakan administrasi kedinasan yang terkait dengan kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Disporabudpar diharapkan dapat mengintegrasikan potensi sosial dan ekonomi masyarakat dalam satu kerangka kerja strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2021, Disporabudpar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pariwisata memiliki tiga subkoordinator yang masing-masing mengelola daya tarik destinasi, pemasaran, dan usaha pariwisata. Struktur

organisasi ini dirancang untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Disporabudpar juga berfokus pada pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya lokal. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi, promosi pariwisata daerah, dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Selain itu, dinas ini juga memiliki fungsi untuk membina dan melestarikan kebudayaan daerah seperti kesenian barongan, tayub, dan berbagai kegiatan budaya lainnya yang menjadi ciri khas Kabupaten Blora. Melalui upaya tersebut, diharapkan sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi Disporabudpar terletak pada keterbatasan infrastruktur penunjang wisata, kapasitas sumber daya manusia, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam promosi pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan tata kelola destinasi wisata, penguatan kemitraan dengan masyarakat lokal, serta penerapan konsep pariwisata yang berkelanjutan, berbasis budaya dan lingkungan. Keberhasilan Disporabudpar dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Blora.

2.2.1 Data dan Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora, yang memiliki luas wilayah 1.955,82 km² dan jumlah penduduk sekitar 925.434 jiwa pada pertengahan tahun 2024, memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 18 desa wisata tersebar di 16 kecamatan, masing-masing dengan karakteristik dan

daya tarik yang berbeda. Keberagaman ini mencakup sektor alam, budaya, ekonomi kreatif, buatan, dan peternakan, yang mencerminkan upaya untuk memanfaatkan potensi lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Desa Sambongrejo di Kecamatan Sambong, yang mengedepankan kearifan lokal budaya Samin, serta Desa Bangowan di Kecamatan Jiken yang mengandalkan potensi alam melalui agrowisata, menunjukkan keberagaman basis wisata yang dapat dikembangkan. Desa-desa lain seperti Desa Balong dan Desa Bangsri di Kecamatan Jepon lebih mengutamakan pengembangan ekonomi kreatif dan buatan sebagai daya tarik wisata, dengan menawarkan produk lokal yang bernilai tambah.

Tabel berikut ini menggambarkan lebih lanjut desa-desa wisata di Kabupaten Blora beserta basis pengembangan yang dimiliki oleh masing-masing desa:

Tabel 2. 3 Desa Wisata di Kabupaten Blora

No.	Nama Desa	Kecamatan	Basis Pengembangan
1	Desa Sambongrejo	Sambong	Budaya
2	Desa Tunjungan	Tunjungan	Alam
3	Desa Balong	Jepon	Ekonomi Kreatif
4	Desa Tempellemahbang	Jepon	Ekonomi Kreatif dan Buatan
5	Desa Bangowan	Jiken	Alam
6	Desa Ledok	Sambong	Alam
7	Desa Palon	Jepon	Peternakan
8	Desa Singonegoro	Jiken	Alam
9	Desa Waru	Jepon	Alam
10	Desa Janjang	Jiken	Budaya dan Alam
11	Desa Tempuran	Blora	Alam
12	Desa Mendenrejo	Kradenan	Alam dan Budaya
13	Desa Bangsri	Jepon	Ekonomi Kreatif dan Buatan
14	Desa Pengkoljagong	Jati	Alam dan Buatan
15	Desa Klopoduwur	Banjarejo	Budaya dan Alam
16	Desa Nglobo	Jiken	Alam dan Buatan
17	Desa Tinapan	Todanan	Alam
18	Desa Karangjong	Ngawen	Alam

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Keberagaman basis pengembangan yang dimiliki oleh setiap desa wisata menunjukkan potensi besar dalam memperkaya sektor pariwisata di Kabupaten Blora. Meskipun jumlah desa wisata cukup signifikan, pengelolaan yang baik dan terencana tetap diperlukan mengingat tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat desa wisata, baik bagi perekonomian masyarakat lokal maupun untuk pelestarian alam dan budaya setempat. Pengelolaan desa wisata yang berbasis potensi lokal dapat menjadi katalisator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.

2.2.2 Kebijakan Kepariwisata Daerah

Perda Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Blora Tahun 2023–2025 menjadi dasar kebijakan yang mengarahkan pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan ini mendorong pengelolaan destinasi berbasis kawasan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, termasuk Desa Wisata Balong. Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama, dengan harapan dapat memperkuat pengelolaan dan keberlanjutan pariwisata di tingkat desa.

Perda ini memberikan kerangka yang jelas, namun penerapannya menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya yang seringkali menghambat efektivitas kolaborasi. Pengembangan Desa Wisata Balong, meskipun memiliki potensi besar, masih terhambat oleh kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Komitmen yang kurang kuat dan kurangnya

infrastruktur yang memadai menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Pentingnya implementasi konkret dari kebijakan ini tidak bisa diabaikan. Keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan struktural menghalangi pengembangan yang berkelanjutan. Meskipun regulasi ini sudah jelas, kolaborasi antara aktor yang terlibat harus diperkuat agar potensi wisata di Desa Wisata Balong dapat berkembang sesuai harapan.

2.2.3 Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Blora

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Blora menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya infrastruktur, khususnya aksesibilitas menuju desa-desa wisata yang masih dalam kondisi kurang memadai. Jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas transportasi yang memadai menghambat arus wisatawan, meskipun Blora memiliki potensi alam dan budaya yang sangat menarik. Selain itu, pengelolaan desa wisata juga terkendala oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam hal pengelolaan dan pelayanan wisata. Banyak masyarakat lokal yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola destinasi wisata secara profesional, baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Keterbatasan dana menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Banyak desa wisata di Blora yang kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang cukup untuk pengembangan fasilitas, perbaikan infrastruktur, dan kegiatan promosi yang efektif. Tanpa adanya alokasi dana yang memadai, pengembangan desa wisata tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu, kurangnya kolaborasi yang efektif antara

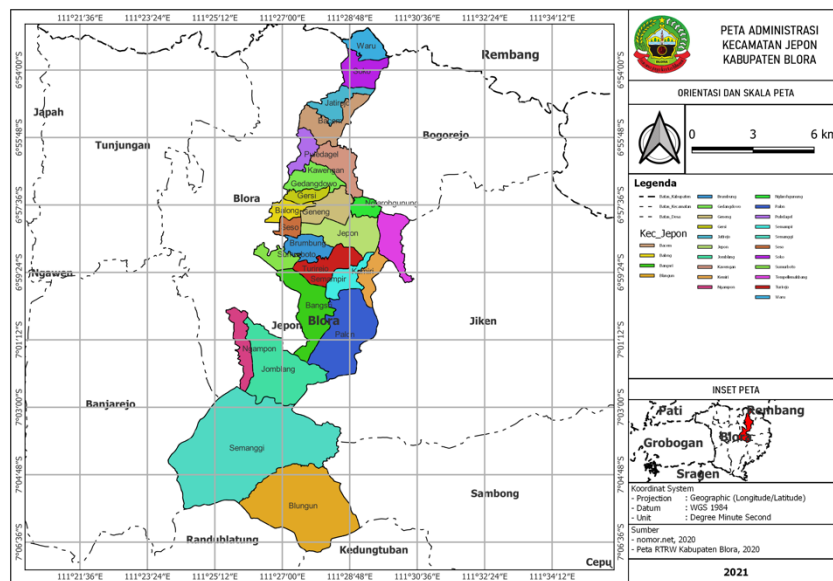
pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kendala dalam pengelolaan desa wisata. Tanpa sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, pengelolaan potensi wisata yang ada tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pelestarian desa wisata juga masih rendah. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata seringkali terbatas, yang berdampak pada kurangnya keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Tantangan terakhir yang dihadapi adalah keterbatasan dalam pemasaran. Banyak desa wisata di Blora yang belum memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara optimal untuk mempromosikan potensi wisata mereka, sehingga destinasi wisata tersebut belum dikenal luas oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dan kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak terkait untuk memastikan pengembangan desa wisata di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

2.3 Profil Desa Balong

2.3.1 Kondisi Geografis, Demografi, dan Sosial Ekonomi Desa Balong

Desa Balong terletak di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah yang tegas dan jelas. Koordinat geografis desa ini berada pada bujur 111°27'09.69" dan lintang 6°57'44.37". Secara administratif, Desa Balong mencakup luas wilayah sekitar 1,3418 km² yang terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan, seperti persawahan, perladangan, pekarangan, kerajinan, dan hutan. Batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gersi, Kecamatan Jepon; di sebelah timur berbatasan dengan Desa Geneng, Kecamatan Jepon; di sebelah selatan berbatasan dengan Desa

Desa Balong berada pada kawasan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Posisi geografis ini sangat mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kacang hijau. Potensi alam yang dimiliki oleh Desa Balong juga tercermin dari tanahnya yang kaya akan kandungan klay (tanah liat), menjadikannya pusat industri kerajinan tanah liat, seperti genteng, batu bata, dan keramik. Tanah yang subur ini memperkuat sektor pertanian sekaligus menjadi basis industri kerajinan yang berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa.



Topografi Desa Balong, yang sebagian besar merupakan dataran rendah, mendukung pembukaan infrastruktur yang diperlukan untuk pertanian dan industri. Sebagian besar lahan digunakan untuk sawah dan tegalan, serta untuk pembuatan kerajinan berbahan dasar tanah liat. Pembangunan dan pemeliharaan sarana

irigasi serta jalan usaha tani sangat penting untuk menunjang hasil pertanian yang optimal. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis industri kerajinan tanah liat yang dapat menjadi sumber pendapatan baru.



Gambar 2. 4 Peta Penggunaan Lahan Desa Balong

Pengelolaan potensi alam yang optimal, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan industri, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa Balong. Desa Balong juga diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar dapat mengelola potensi-potensi ini dengan lebih baik, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak.

2.3.2 Potensi Utama Desa Balong

Salah satu potensi utama Desa Balong yang sangat menonjol adalah industri kerajinan tanah liat, yang telah menjadi identitas ekonomi dan budaya desa ini. Tanah liat yang kaya akan kandungan klay di desa ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan, seperti genteng pres,

bata ekspose, dan gerabah/keramik. Produk-produk tersebut tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mendapatkan permintaan tinggi di pasar regional. Industri kerajinan tanah liat ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk desa yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Griya Keramik Blora, yang terletak di Desa Balong, memainkan peran penting sebagai destinasi wisata edukasi, memperkenalkan seni kerajinan tanah liat kepada pengunjung domestik maupun mancanegara. Konsep desa wisata edukasi yang mengusung tema kerajinan tanah liat memberi pengalaman langsung kepada pengunjung untuk melihat dan mempelajari proses pembuatan produk keramik dan tanah liat. Pengembangan sektor pariwisata berbasis edukasi ini turut memperkenalkan keunikan lokal Desa Balong, yang memiliki tradisi kerajinan tanah liat berkualitas tinggi, sebagai daya tarik wisata yang menarik.

Desa Balong juga memiliki potensi budaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Tradisi adat Sedekah Bumi yang rutin dilaksanakan setiap bulan Selo merupakan salah satu contoh yang mencerminkan kekayaan budaya desa ini. Tradisi ini tidak hanya mempererat ikatan sosial antarwarga, tetapi juga menarik minat wisatawan yang tertarik dengan keanekaragaman budaya desa. Selain budaya, desa ini memiliki potensi pertanian yang sangat produktif meskipun masih bergantung pada curah hujan dan sistem irigasi tadah hujan. Komoditas pertanian seperti padi, jagung, kacang hijau, dan cabai menjadi sumber utama pangan di desa ini dan sekitarnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cermat agar potensi desa tidak hanya terfokus pada satu sektor, melainkan berkembang secara seimbang dan berkelanjutan. Pengembangan sektor kerajinan dan pertanian yang saling mendukung akan menciptakan desa yang

mandiri dan memiliki daya saing di tingkat regional maupun nasional.

2.3.3 Infrastruktur Pendukung dan Sarana Pariwisata

Infrastruktur di Desa Balong telah cukup mendukung pengembangan potensi-potensinya, khususnya dalam sektor pariwisata dan kerajinan. Keberadaan jalan aspal yang menghubungkan desa dengan kecamatan dan kabupaten mempermudah aksesibilitas baik bagi masyarakat desa maupun pengunjung luar daerah. Meskipun demikian, beberapa infrastruktur lainnya masih memerlukan perbaikan, seperti jalan kerikil dan tanah yang menghubungkan beberapa pemukiman warga. Peningkatan kualitas jalan ini menjadi sangat penting agar akses menuju berbagai titik vital dalam desa, seperti pusat kerajinan, destinasi wisata, dan fasilitas umum, dapat dijangkau dengan lebih mudah dan nyaman. Keberadaan jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan di desa ini juga berperan sebagai faktor penunjang yang sangat krusial dalam mendukung aktivitas perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun demikian, sektor kesehatan masih membutuhkan perhatian khusus, mengingat desa ini belum memiliki Puskesmas, yang merupakan fasilitas penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.

Sektor pariwisata Desa Balong telah memanfaatkan potensi kerajinan tanah liat melalui pembangunan Griya Keramik Blora sebagai pusat kegiatan wisata edukasi. Langkah ini sangat strategis dalam mengembangkan desa sebagai destinasi wisata yang mengutamakan pendidikan tentang kerajinan tanah liat. Griya Keramik Blora, sebagai destinasi wisata unggulan di desa ini, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mempelajari proses pembuatan produk keramik dan tanah liat, yang turut memberikan peluang ekonomi

bagi masyarakat setempat. Desa Balong juga semakin mengembangkan sektor pariwisata melalui keberadaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang berperan dalam mengorganisir kegiatan wisata dan pengelolaan fasilitas pariwisata lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana ini, desa ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat wisata edukasi dan industri kreatif, yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas wisata sangat diperlukan, selain pelatihan bagi masyarakat dalam bidang pelayanan pariwisata dan pengelolaan kerajinan yang lebih profesional.

2.3.4 Status Desa Wisata Balong

Desa Balong telah ditetapkan sebagai Desa Wisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 556/427.1/2020 pada tanggal 20 Desember 2020. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemberdayaan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Dengan adanya klasifikasi sebagai Desa Wisata, Desa Balong semakin mendapat perhatian dalam pengembangan potensi wisatanya, khususnya yang berbasis pada edukasi kerajinan tanah liat dan produk-produk lokal lainnya. Legalitas ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata desa yang lebih terstruktur, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam seluruh prosesnya.

Berdasarkan keputusan tersebut, Desa Balong mendapatkan klasifikasi sebagai Desa Wisata dengan status rintisan. Penetapan ini memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan daya tarik wisata, terutama melalui produk kerajinan

tanah liat yang menjadi ciri khas desa. Selain itu, status ini membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur wisata, seperti peningkatan fasilitas di Griya Keramik Blora, yang menjadi pusat kegiatan wisata edukasi di desa ini. Keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mengelola destinasi wisata ini juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Penetapan sebagai desa wisata dengan klasifikasi rintisan diharapkan mampu membawa Desa Balong ke arah yang lebih maju, baik dari segi ekonomi maupun pembangunan masyarakat, sekaligus memperkenalkan budaya lokal yang kaya kepada pengunjung dari berbagai daerah.

2.4 Desa Wisata Balong dalam Konteks *Collaborative Governance*

2.4.1 Aktor-Aktor yang Terlibat

Dalam pengelolaan Desa Wisata Balong, aktor-aktor yang terlibat sangat menentukan keberhasilan kolaborasi yang akan mempengaruhi pengembangan destinasi wisata. Pemerintah desa memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan lokal, namun implementasi kebijakan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk sektor pariwisata pada APBDes Desa Balong hanya sebesar 0,13% pada tahun 2024, sebuah angka yang sangat minim mengingat potensi besar yang dimiliki desa ini. Meskipun demikian, pemerintah desa seharusnya memainkan peran lebih strategis dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pengembangan wisata dan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat.

Pokdarwis, sebagai kelompok yang seharusnya menggerakkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat, juga mengalami kendala dalam hal kapasitas

kelembagaan. Penurunan jumlah anggota aktif Pokdarwis, yang semula puluhan kini hanya menyisakan delapan orang yang terlibat secara aktif, menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Hal ini menjadi persoalan utama, karena meskipun Pokdarwis memiliki potensi besar dalam operasionalisasi desa wisata, keterbatasan sumber daya dan keterlibatan masyarakat menghambat pengelolaan destinasi secara optimal. Masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pengelolaan desa wisata, tidak cukup dilibatkan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan. Dampaknya, meskipun ada struktur yang ada, partisipasi dan kontribusi masyarakat tetap rendah, menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sektor swasta, meskipun diharapkan memberikan kontribusi dalam hal investasi, pemasaran, dan pengembangan fasilitas wisata, masih sangat minim keterlibatannya. Peran swasta dalam hal pengelolaan wisata di Desa Balong sangat terbatas dan belum memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat pengembangan desa wisata. Keterbatasan dana dan dukungan dari sektor swasta ini membuat kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan swasta terputus-putus, tanpa adanya kesepahaman yang jelas tentang tujuan dan langkah strategis yang perlu diambil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kendala-kendala ini dan memperbaiki sistem kolaborasi agar lebih terstruktur, inklusif, dan berbasis pada visi yang jelas untuk perkembangan jangka panjang desa wisata.

2.4.2 Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Balong masih menunjukkan tingkat yang rendah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk

melibatkan masyarakat melalui Pokdarwis. Penurunan jumlah anggota Pokdarwis yang aktif, yang sebelumnya puluhan kini hanya tinggal delapan orang, menggambarkan adanya disfungsi dalam sistem partisipasi masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun struktur organisasi sudah ada, kontribusi nyata masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata desa masih sangat terbatas. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah orientasi ekonomi masyarakat yang lebih condong ke sektor industri kerajinan tanah liat, yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial daripada sektor pariwisata. Ketidaktertarikan masyarakat ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran dan pemahaman mereka mengenai potensi jangka panjang yang bisa dihasilkan dari pengembangan desa wisata. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara harapan pembangunan pariwisata dan kenyataan di lapangan, di mana masyarakat belum melihat pariwisata sebagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Keterbatasan partisipasi di Desa Wisata Balong berakar pada minimnya pelatihan relevan dan pengembangan kapasitas dari pemerintah desa, yang gagal membekali masyarakat dengan keterampilan manajerial. Kondisi ini diperburuk oleh defisit transparansi dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan masyarakat teralienasi sebagai objek kebijakan daripada subjek aktif yang berdaulat. Tanpa mekanisme inklusif untuk menyerap aspirasi warga, pengelolaan desa akhirnya terjebak dalam eksklusivitas kelompok tertentu, sementara mayoritas masyarakat tetap berada dalam posisi pasif.